BAB IX

SISTEM EKONOMI INDONESIA: PANCASILA SEBAGAI PLATFORM EKONOMI NASIONAL

A. Landasan Sistem Ekonomi Indonesia

Pancasila sebagai ideologi nasional membawa keharusan untuk dijadikan dasar atau pedoman dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Secara normatif landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada:

1. *Ketuhanan YME*, yaitu berlakunya etika dan moral agama, bukan materialism.
2. *Kemanusiaan yang adil dan beradab*, yaitu tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi,
3. *Persatuan Indonesia*, yaitu berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosionalisme, dan sosio-demokrasi dalam ekonomi,
4. *Kerakyatan*, yakni mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak,
5. *Keadilan sosial*, yakni asas persamaan atau emansipasi.

B. Pancasila sebagai Platform Ekonomi

Ekonomi Pancasila sebagai Sistem Ekonomi yang berplatform (Prof. Mubyarto: 1981):

- Moral agama
- Moral kemerataan sosial
- Moral nasionalisme ekonomi
- Moral kerakyatan
- Moral keadilan sosial

Masih relevankah platform Pancasila dengan kondisi sosial-ekonomi saat ini? Relevansi tersebut dapat dideteksi melalui 3 (tiga) konteks, yaitu:

1. Cita-cita ideal pendiri bangsa
2. Praktek ekonomi rakyat

3. Praktek ekonomi aktual (berwatak liberal, individualistis dan kapitalistik)

Platform Pertama: Moral Agama

Artinya pembangunan ekonomi harus beriringan dengan pembangunan moral atau karakter bangsa dan ditujukan untuk menjamin keadilan antar sesama makhluk ciptaan Allah SWT, bukan hanya sekedar pembangunan materil.

Platform Kedua: Kemerataan Sosial

Yaitu kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial, tidak membiarkan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial terjadi dimana-mana.

Platform Ketiga: Nasionalisme ekonomi

Bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh, kuat dan mandiri. Sesuai dengan konsep founding fathers (Soekarno dan Hatta) politik-ekonomi berdikari, yang bersendikan usaha mandiri (*self-help*), percaya diri (*self-reliance*) dan pilihan politik luar negeri yang bebas aktif.

Platform Keempat: Demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan

Bahwa seharusnya koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat. Sementara kenyataan di lapangan, upaya penegakan demokrasi ekonomi dihadapkan dengan upaya-upaya untuk memperjuangkan pasar bebas, yang menjadi senjata penganut liberalism dan kapitalisme. Contoh: privatisasi BUMN dan Liberalisasi impor.

Platform Kelima: Keadilan Sosial

Keseimbangan yang harmonis, efesien dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas dan bertanggung jawab menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

C. Paradigma Pembangunan yang Berkeadilan Sosial

Sesuai dengan platform yang kelima dari sistem ekonomi Pancasila: Keadilan Sosial, maka moral pembangunan berdasarkan platform kelima ini haruslah menyangkut hal berikut ini:

1. Peningkatan partisipasi dan emansipasi rakyat laki-laki dan perempuan serta otonomi daerah
2. Penyegaran nasionalisme ekonomi melawan ketidakadilan
3. Pendekatan pembangunan berkelanjutan
4. Pencegahan kecenderungan disintegrasi nasional
5. Pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu sosial di universitas
6. Penghormatan HAM dan masyarakat.

Untuk mensukseskan paradigma pembangunan diatas, dapat dilakukan beberapa strategi kebijakan sebagai berikut:

1. *Ketetapan hati,* yaitu menciptakan pembangunan dengan ketetapan hati bahwa pembangunan ini dilakukan dari rakyat untuk rakyat sehingga hasilnya harus dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat tanpa terkecuali.
2. *Penghentian Kemiskinan*, yaitu kesadaran bahwa kemiskinan merupakan hal yang paling penting sebagai masalah sosial ekonomi yang harus diselesaikan. Kemiskinan dapat menciptakan berbagai masalah baru dalam masyarakat jika tidak diselesaikan dengan baik, seperti pengangguran dan kriminalitas. Sehingga perlu diciptakan strategi yang tepat dalam pembangunan untuk menghapus kemiskinan.
3. *Menghapus Pengangguran.* pengangguran terkadang juga muncul sebagai akibat tidak teratasinya masalah kemiskinan dengan baik. Sehingga jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan atau pengganggguran terus bertambah banyak. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah menciptakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang padat karya sehingga mampu menyerab tenaga kerja. Selain itu, meningkatkan pendidikan masyarakat juga dapat memperkecil tingkat pengangguran karena sumber daya manusia Indonesia memiliki pendidikan yang lebih baik sekaligus meningkatkan keterampilan.
4. Revitalisasi Perbankan. Masalah yang paling berat dihadapi Indonesia disaat krisi moneter tahun 1998 yang lalu adalah masalah buruknya kinerja perbankan di Indonesia. Tidak sedikit jumlah Bank di Indonesia yang pailit dan merugikan Negara

dengan meninggalkan setumpuk hutang yang tentu saja nilainya tidak sedikit. Buruknya kinerja perbankan di Indonesia, selain akibat tidak tersedianya sistem yang mampu mengawasi kedisiplinan para pelaku perbankan, juga diperparah dengan budaya korupsi, kolusi dan Neporisme (KKN) yang sudah sangat sistemik.

5. *Kebijakan pertanian yang memihak petani*. Globalisasi menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Globalisasi merupakan proses yang tidak mungkin dapat dihindari, tetapi wajib untuk dihadapi. Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat rentan terhadap gelombang globalisasi. Sehingga sudah menjadi keharusan pemerintah mempersiapkan perangkat kebijakan yang berpihak pada petani, tidak justru kebalikannya berpihak kepada para pemilik modal yang hanya mengejar keuntungan bagi kelompoknya saja.

6. Hubungan keuangan pusat dan daerah. Otonomi daerah diharapkan menjadi solusi untuk membuat pembangunan Negara Indonesia menjadi lebih merata. Sehingga prinsip keadilan sosial semakin terlaksana. Dengan otonomi daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah juga menjadi lebih proporsional.

7. *Pengelolaan perdagangan bebas*. Perdagangan bebas, sebagai salah satu bentuk globalisasi ekonomi semakin di depan mata. Yang harus dilakukan adalah mempersiapkan Sumber daya Manusia (SDM) agar lebih mampu bersaing dengan SDM luar negeri. Peningkatan mutu produk lokal juga harus dilakukan untuk menangkal maraknya produk luar. Serta kebijakan-kebijakan yang mampu meminimalisir kelemahan dari sistem ekonomi kita.